

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah Hehamahua, *Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004.
- Andre Johannes Wattie, *Sifat EkseSIONAL Tertangkap Tangan dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana*, Lex Crime Vol.IV/No.5/Juli/2015.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Deni RM, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung, 1994.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty Yogyakarta, 1988.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tanpa penerbit dan Tahun, Bandung.
- Erdianto Effendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Fatimah Asyari, *Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum*, Vol.2, No.1, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II, Prenada Media Grup, Depok, 2018.
- Lawrence Friedman, *“American Law”*, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Muhammad Taufik Makarau dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta Indonesia, 2004

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung 1997,

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Soerjono Soekanto , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1983

Sudarto, *Hukum Pidana I A*. Semarang, 1995 Penerbit FH UNDIP.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru  
Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1987

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Simons, *Leeboek*

Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Utsman Sabiar, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Bandung: Pustaka Pelajar

Van Hammel, *Inleiding*,

Van Bemmelen, *ons Strafrecht II*

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

## B. Jurnal

Dini Dewi Heniarti, "INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People",

Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, 2016.

## C. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrapment-1>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/20372611/begini-kronologi-ott-kpk-yang-menjaring-komisioner-kpu-wahyu-setiawan?page=all>.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5854/9889>.

Widya Parameswari R, Anak Agung Istri Ari A. D, *Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan*

*Tindak Pidana Korupsi*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2019, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47816>, 30 Mei 2020 Pukul 14.00 WIB.

Boy. (2017). KPK Beberkan Cara Lakukan OTT. Retrieved from [jpn.com](http://jpn.com) website: <https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott>  
Diakses 10 Juli 2020 Pukul 13.30 WIB

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Suap

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.